



**IKHTISAR LHKPN a.n MILARNO
(Jenis Laporan - Tahun: Khusus (Akhir Menjabat) – 2022)
NIK 3401021812760061**

1. DATA PRIBADI

Nama : MILARNO
NIK : 3401021812760061
No KK : -
NPWP : 67.471.721.0.544.000
Jenis Kelamin : Laki Laki
Tempat/Tanggal Lahir : KULON PROGO/18 Desember 1976
Status Nikah : Menikah
Agama : ISLAM
Alamat : SEBOKARANG WATES KULON PROGO, WATES, KULON PROGO, D.I. YOGYAKARTA
Nomor Handphone : 081578119733
Email : milarno2@gmail.com
NHK : -
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Jabatan : BENDAHARA - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Tanggal Laporan : 31 Desember 2022
Tanggal Kirim : 9 Februari 2023
Status : Perlu Perbaikan



2. DATA KELUARGA

NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN PN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR / JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT RUMAH
1	RINI WIDIASTUTI	ISTRI	KULON PROGO , 10 Oktober 1978 / PEREMPUAN	WIRASWASTA	SEBOKARANG WATES KULON PROGO, Kelurahan WATES, Kecamatan WATES, Kabupaten/Kota KULON PROGO, Provinsi D.I. YOGYAKARTA

3. JABATAN

NO	JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON	LEMBAGA	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA
1	BENDAHARA	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

4. DATA HARTA

4.1. TANAH / BANGUNAN

NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jalan / No : JL GAMBIR ANOM GG MANDELA Kel. / Desa : PANDEYAN Kecamatan : UMBUL HARJO Kab. / Kota : KOTA YOGYAKARTA Prov. / Negara : D.I. YOGYAKARTA / INDONESIA	Tanah: 141 m ² Bangunan: 100 m ²	Jenis Bukti: SERTIFIKAT Nomor Bukti: 13.05.13.05.1.04989 Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Pemanfaatan: TEMPAT TINGGAL Tahun Perolehan: 2016	Rp. 0	Rp. 500.000.000	-
Sub Total					Rp. 500.000.000	

4.2. ALAT TRANSPORTASI / MESIN



NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : MOTOR Merk : HONDA Model : AFX12U21C08M/T Tahun Pembuatan : 2014 No. Pol. / Registrasi : AB 2296 SL	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI Lainnya: - Tahun Perolehan: 2015	Rp. 0	Rp. 10.000.000	-
Sub Total				Rp. 10.000.000	

4.3. HARTA BERGERAK LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : HARTA BERGERAK LAINNYA Jumlah : 1 Satuan : BUAH Ket. Lainnya : Berupa sepeda motor Tahun Perolehan: 2015	HASIL SENDIRI, LAINNYA	Rp. 0	Rp. 10.000.000	-
Sub Total				Rp. 10.000.000	

4.4. SURAT BERHARGA

NO	URAIAN	NO. REKONING / NO. NASABAH	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total					Rp. 0	

4.5. KAS / SETARA KAS



NO	URAIAN	INFORMASI REKENING	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : TABUNGAN Keterangan : - Nama Bank / Lembaga : BPD DIY	Nomor : 006.221.015660 Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	HASIL SENDIRI	Rp. 5.000.000	-
Sub Total				Rp. 5.000.000	

4.6. HARTA LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 0	

4.7. HUTANG

NO	URAIAN	NAMA KREDITUR	BENTUK AGUNAN	NILAI AWAL HUTANG	NILAI SALDO HUTANG
1	Jenis : HUTANG KONSUMTIF (KPR, KENDARAAN, KARTU KREDIT, MULTIGUNA) Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	MILARNO	SK PNS	Rp. 210.000.000	Rp. 194.465.850
Sub Total				Rp. 210.000.000	Rp. 194.465.850

5. PENERIMAAN

5.1. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
----	------------------	----------------------	----------



NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
1	Gaji dan Tunjangan	Rp. 51.860.620	Rp. 0
2	Penghasilan dari Profesi/Keahlian	Rp. 0	Rp. 0
3	Honorarium	Rp. 0	Rp. 0
4	Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, THR	Rp. 3.200.000	Rp. 0
5	Penerimaan Pekerjaan Lainnya	Rp. 0	Rp. 1.000.000
Sub Total		Rp. 55.060.620	Rp. 1.000.000

5.2. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Hasil Investasi dalam Surat Berharga	Rp. 0
2	Hasil Usaha/Sewa	Rp. 0
3	Bunga Tabungan/Deposito dan Lainnya	Rp. 0
4	Penjualan atau Pelepasan Harta	Rp. 0
5	Penerimaan Lainnya	Rp. 0



NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
	Sub Total	Rp. 0

5.3. PENERIMAAN LAINNYA

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Penerimaan Hutang	Rp. 0
2	Penerimaan Warisan	Rp. 0
3	Penerimaan Hibah/Hadiah	Rp. 0
4	Lainnya	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 0

6. PENGELUARAN

6.1. PENGELUARAN RUTIN

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Rumah Tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit)	Rp. 6.000.000
2	Biaya Sosial (antara lain keagamaan, zakat, infaq, sumbangan lain)	Rp. 1.500.000



NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
3	Pembayaran Pajak (antara lain PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain)	Rp. 1.000.000
4	Pengeluaran Rutin Lainnya	Rp. 42.000.000
Sub Total		Rp. 50.500.000

6.2. PENGELUARAN HARTA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Pembelian/Perolehan Harta Baru	Rp. 0
2	Pemeliharaan/Modifikasi/Rehabilitasi Harta	Rp. 1.000.000
3	Pengeluaran Non Rutin Lainnya	Rp. 500.000
Sub Total		Rp. 1.500.000

6.3. PENGELUARAN LAINNYA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah	Rp. 0
2	Pelunasan/Angsuran Hutang	Rp. 210.000.000



NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
3	Pengeluaran Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 210.000.000

7. LAMPIRAN FASILITAS

NO	URAIAN	NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS	KETERANGAN
----	--------	------------------------------	------------

8. TOTAL HARTA KEKAYAAN

NO	TOTAL HARTA	TOTAL HUTANG	TOTAL HARTA KEKAYAAN
1	Rp. 525.000.000	Rp. 194.465.850	Rp. 330.534.150

Catatan :

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.